

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jln. Muhammad Malikul Zhahir No. 145 Telp. (0645) 46997 Fax. (0645) 41991
KOTA LHOKSEUMAWE



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. LKj-IP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj-IP Tahun 2020 ini sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKj-IP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dimasa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LKj-IP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dan kepada Allah SWT kita memohon petunjuk dan bimbingan, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lhokseumawe, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKEUMAWE,**



Ir. MARWADI YUSUF, M.Si
NIP. 19641118 199301 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Seperti diketahui, RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran BPKD Kota Lhokseumawe kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Berbagai agenda dan prioritas pembangunan tersebut sampai dengan tahun 2020. Karenanya, seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai tentunya perlu dilihat evaluasi 1 (satu) tahun atau pada tahun 2020 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kota Lhokseumawe merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kota Lhokseumawe harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jadi visi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Kota Lhokseumawe dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi,

potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kota Lhokseumawe adalah :

**“Mewujudkan Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas
Dan Sejahtera Berdasarkan UU-PA Dan MoU Helsinki”**

Misi merupakan rumusan umum yang memuat tentang suatu tindakan atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan rumusan misi mempunyai peran yang sangat penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi Kota Lhokseumawe. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKD Kota Lhokseumawe serta untuk mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi keempat : “Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance), demokrasi yang berlandaskan hukum, yaitu pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah yakni upaya-upaya peningkatan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur Pemerintahan Daerah, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Demikian pula memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan

budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil;”

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam merealisasikan visi dan misi tersebut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK.

Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut :
 - a. Persentase cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %
 - b. Persentase besaran penerimaan PAD tidak dapat dicapai sesuai dengan target ini disebabkan kurangnya tenaga petugas dan SDM dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta belum tergarapnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di 4 kecamatan dengan maksimal sehingga persentase yang dapat dicapai sebesar 95,92 %
 - c. Persentase penyediaan pedoman dan dokumen APBK dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %
 - d. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat dicapai sesuai dengan target predikat WTP sehingga capaian persentasenya sebesar 100 %

- e. Persentase laporan pengelolaan aset daerah dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %
2. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian sebagai berikut :
- a. Persentase cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah dapat dicapai sesuai dengan target sehingga persentasenya sebesar 100 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
• Personil	5
• Sarana dan Prasarana	6
• Pendapatan dan Pembiayaan	9
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
• Visi dan Misi	11
• Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	12
• Program dan Kegiatan	15
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019	27
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019	33

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019	43
BAB IV PENUTUP	49

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022;
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020;
4. Lampiran lainnya.

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1.	Jumlah Personil	5
2.	Tabel 1.2.	Sarana dan Prasarana	6
3.	Tabel 1.3.	Pendapatan	9
4.	Tabel 1.4.	Pembiayaan	9
5.	Tabel 2.1.	Misi – Tujuan	14
6.	Tabel 2.2.	Tujuan – Sasaran	15
7.	Tabel 2.3.	Rencana Strategis BPKD Kota Lhokseumawe	19
8.	Tabel 2.4.	Sasaran dan Indikator Sasaran	20
9.	Tabel 2.5.	Kegiatan dan Indikator Kegiatan	21
10.	Tabel 2.6.	Matrik Perjanjian Kinerja BPKD Tahun 2020	26
11.	Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja	28
12.	Tabel 3.2.	Data Penilaian Pencapaian Sasaran Tahun 2020	32
13.	Tabel 3.3.	Data Pencapaian Kegiatan Tahun 2020	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, berkewajiban menyampaikan LKj-IP sebagai bentuk pertanggung jawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada OPD.

Berikut ini diuraikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP), dan sistematika penyajian LKj-IP.

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dijelaskan bahwa Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan diantaranya adalah Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan tolok ukur OPD dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama satu tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang daerah Kota Lhokseumawe. Adapun penyusunan LKj-IP Tahun 2020 ini mengacu pada RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022 dengan

memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan memperhatikan tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPKD Kota Lhokseumawe melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok "Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah".

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyusunan rencana dan program kerja dinas;
- c. perumusan dan penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan dan BPHTB, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset;
- e. pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak bumi dan bangunan;
- f. pengelolaan pajak bumi dan bangunan dan BPHTB;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi keuangan daerah;
- i. pengelolaan aset daerah;
- j. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

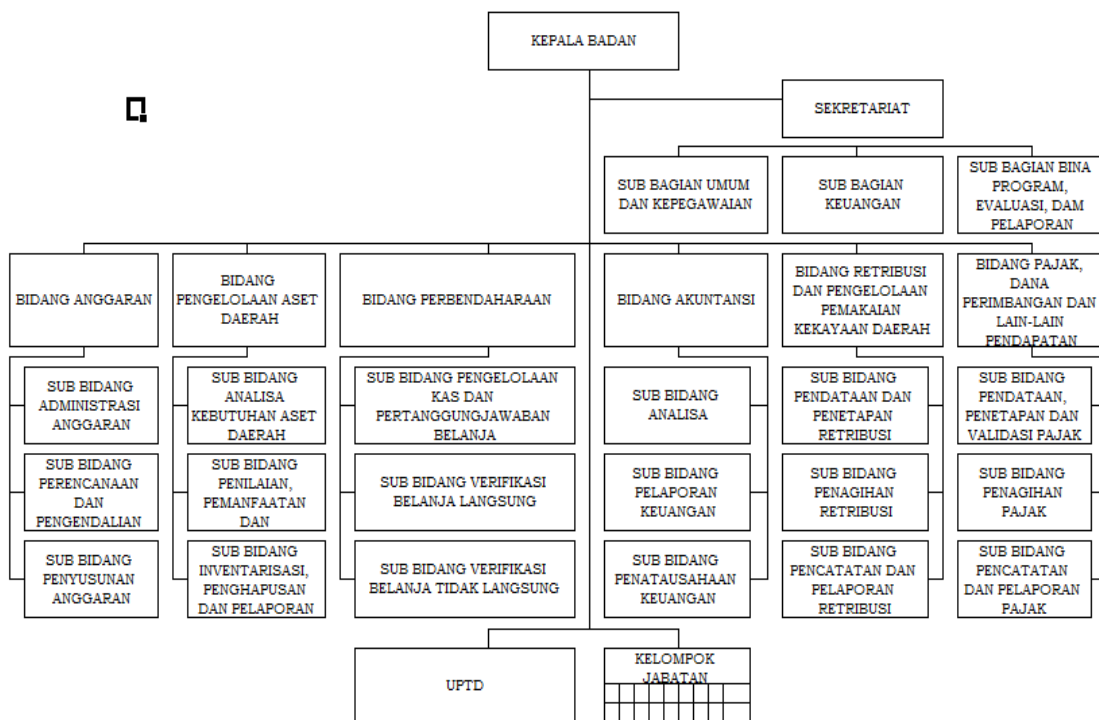
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Anggaran;
4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;

5. Bidang Perbendaharaan;
6. Bidang Akuntansi;
7. Bidang Retribusi dan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah;
8. Bidang Pajak, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan;
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam bentuk bagan struktur adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWA



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, perlu adanya dukungan Personil, Sarana dan Prasarana, Pendapatan serta Pembiayaan sebagai berikut :

- **Personil.**

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, pangkat dan golongannya. Kondisi kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe hingga akhir Desember 2020 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Personil

No.	JABATAN STRUKTURAL	JUM LAH	PANGKAT / GOL RUANG	JUM LAH	PENDIDI KAN FORMAL	JUM LAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S1	1	
3	Kabid	6	Pembina (IV/a)	2	S2	2	
			Pembina (IV/a)	3	S1	3	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S2	1	
4	Kasubbag	3	Penata Tk.I(III/d)	1	S1	1	
			Penata (III/c)	1	S1	1	
			Penata Muda Tk.I (III/b)	1	S1	1	
5	Kasubbid	18	Penata Tk. I (III/d)	4	S1	4	
			Penata Tk. I (III/d)	6	S2	6	
			Penata (III/c)	6	S1	6	
			Penata (III/c)	2	S2	2	
6	Staf	44	Penata Tk. I, (III/d)	3	S1	3	
			Penata, (III/c)	4	S1	4	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	12	S1	12	
			Penata Muda, (III/a)	8	S1	8	
			Penata Muda, (III/a)	2	D-III	2	
			Pengatur Tk. I, (II/d)	1	D-III	1	
			Penata Muda Tk. I (III/b)	1	SMA	1	
			Pengatur Tk. I, (II/d)	6	SMA	6	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengatur, (II/c)	1	D-III	1	
			Pengatur, (II/c)	4	SMA	4	
			Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	SMA	1	
			Pengatur Muda, (II/a)	1	SMA	1	
Jumlah		73		73		73	

- **Sarana dan Prasarana**

Guna menunjang kegiatan-kegiatan di bidang pengelolaan keuangan daerah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dan dimanfaatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe hingga akhir Desember 2020 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1.2
Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah
1	2	3
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit
2	Mesin proses lainnya (dst)	2 Unit
3	Portable Generating Set	2 Unit
4	Pompa lainnya (dst)	1 Unit
5	Mesin borlainnya (dst)	1 Unit
6	Mesin proses lainnya (dst)	2 Unit
7	Portable Generating Set	2 Unit
8	Komputer Jaringan lainnya	6 Unit
9	P.C Unit	93 Unit
10	Lap Top	31 Unit
11	NoteBook	21 Unit
12	Hard Disk	11 Unit
13	Monitor	1 Unit
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	85 Unit
15	External	5 Unit
16	Server	4 Unit
17	Router	2 Unit
18	Peralatan Jaringan lainnya	21 Unit
19	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6 Unit

1	2	3
20	Pick Up	1 Unit
21	Sepeda Motor	58 Unit
22	Alat ukur lain- lain lainnya (dst)	3 Unit
23	Lemari Penyimpan	2 Unit
24	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16Inci)	1 Unit
25	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	35 Unit
26	Mesin Penghitung Uang	1 Unit
27	Lemari Besi/Metal	7 Unit
28	Lemari Kayu	4 Unit
29	Rak Besi	2 Unit
30	Filing Cabinet Besi	12 Unit
31	Brandkas	2 Unit
32	Lemari Kaca	8 Unit
33	CCTV – Camera Control Television System	21 Unit
34	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit
35	Papan Nama Instansi	1 Unit
36	Papan Pengumuman	2 Unit
37	Papan Tulis	1 Unit
38	Alat Kantor Lainnya	16 Unit
39	Meja Kerja Besi/Metal	2 Unit
40	Kursi Besi/Metal	6 Unit
41	Meja Rapat	7 Unit
42	Meja 1/2 Biro	7 Unit
43	Kursi Rapat	32 Unit
44	Kursi Tamu	2 Unit
45	Kursi Biasa	135 Unit
46	Sofa	9 Unit
47	Meubleur lainnya	1 Unit
48	Mesin Penghisap Debu /Vacuum Cleaner	1 Unit
49	A.C. Window	23 Unit
50	A.C. Split	21 Unit
51	Exhause Fan	16 Unit
52	Televisi	13 Unit
53	Loudspeaker	6 Unit
54	Sound System	4 Unit
55	Wireless	5 Unit
56	Camera Video	1 Unit
57	Tiang Bendera	1 Unit

1	2	3
58	Water Filter	1 Unit
59	Tangga Aluminium	1 Unit
60	Dispenser	5 Unit
61	Mimbar/Podium	1 Unit
62	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8 Unit
63	Meja Kerja Pejabat EselonII	2 Unit
64	Meja Kerja Pejabat EselonIII	1 Unit
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	25 Unit
66	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1 Unit
67	Meja Rapat Pejabat EselonII	1 Unit
68	Meja Tamu Biasa	2 Unit
69	Kursi Kerja Pejabat EselonII	1 Unit
70	Kursi Kerja Pejabat EselonIII	7 Unit
71	Kursi Kerja Pejabat EselonIV	21 Unit
72	Kursi Kerja Pegawai NonStruktural	17 Unit
73	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	64 Unit
74	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat EselonII	1 Unit
75	Buffet Kayu	2 Unit
76	Uninterruptible PowerSupply (UPS)	36 Unit
77	Lensa Kamera	1 Unit
78	Layar Film/Projector	11 Unit
79	Camera Digital	1 Unit
80	Telephone (PABX)	3 Unit
81	Facsimile	1 Unit
82	Wireless Amplifier	1 Unit
83	Switcher/Patch Panel	2 Unit
84	Fire Extinghuizer	6 Unit
85	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya(dst)	1 Unit
86	Alat laboratorium makanan lainnya(dst)	1 Unit
87	Precision Filling Machine	3 Unit
88	Distiling Apparatus	1 Unit
89	Data acquisition dan alyzing system lainnya(dst)	6 Unit

• **Pendapatan dan Pembiayaan**

Rincian pendapatan dan pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020, secara singkat tersaji dalam tabel berikut :

**TABEL : 1.3
PENDAPATAN**

No	U R A I A N	JUMLAH	KET
1.	PAD BPKD TA 2020		
	• Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 35.237.500.000,00	
	• Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.900.000.000,00	
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 5.200.000.000,00	
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 5.450.000.000,00	
	Jumlah PAD BPKD	Rp. 47.787.500.000,00	

**TABEL : 1.4
PEMBIAYAAN**

No	U R A I A N	JUMLAH	KET
1	DPA BPKD TA 2020		
	• Belanja Tidak Langsung	Rp. 11.944.471.000,00	
	• Belanja Langsung	Rp. 9.862.008.100,00	
	Jumlah DPA BPKD	Rp. 21.806.479.100,00	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

- Personil;
- Sarana dan Prasarana;
- Pendapatan dan Pembiayaan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKj-IP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

- Visi dan Misi
- Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.
- Program dan Kegiatan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022;
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020;
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBK yang berorientasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2020.

1. Visi dan Misi.

Perumusan visi dan misi jangka menengah Kota Lhokseumawe merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Selain itu, visi juga menjelaskan cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana Kota Lhokseumawe harus dibawa dan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe. Jadi visi Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Kota Lhokseumawe dimasa mendatang dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat. Adapun visi Kota Lhokseumawe adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA LHOKSEUMAWE BERSYARIAT, SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA BERDASARKAN UU-PA DAN MOU HELSINKI”

Pengertian pokok unsur-unsur yang terkandung dalam Visi Daerah Kota Lhokseumawe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersyariat, mengandung pengertian bahwa segenap aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerinthan dilandasi oleh nilai-nilai Agama Islam;
2. Sehat mengandung pengertian bahwa lingkungan hidup dan masyarakat Kota Lhokseumawe yang teratur bersih dan sehat;
3. Cerdas mengandung pengertian bahwa sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe yang berkarakter dan berwawasan global;
4. Sejahtera mengandung pengertian terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kota Lhokseumawe baik materil maupun spiritual;

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui BPKD menjalankan **Misi** sebagai berikut :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*), demokrasi yang berlandaskan hukum, yaitu peningkatan kinerja serta peningkatan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur, pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Demikian pula, memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut diatas, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Adapaun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun **Tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut : ***"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik "***.

- **Indikator Tujuan**

Indikator tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Kategori Reformasi Birokrasi.

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi

pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK.

• **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- 1. Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah.
- 2. Besaran penerimaan PAD.
- 3. Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK.
- 4. Opini BPK Laporan Keuangan Daerah.
- 5. Cakupan laporan pengelolaan aset daerah.
- 6. Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Tabel 2.1
MISI – TUJUAN

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	
Misi	Mewujudkan Kota Lhokseumawe dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance), demokrasi yang berlandaskan hukum		
Tujuan :			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	a.	Kategori Reformasi Birokrasi	

Tabel 2.2
TUJUAN – SASARAN

SASARAN		INDIKATOR SASARAN
Tujuan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
<i>Sasaran Strategis 1 :</i>		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. 5. 	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah Besaran penerimaan PAD Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK Opini BPK Laporan Keuangan Daerah Cakupan laporan pengelolaan aset daerah
<i>Sasaran Strategis 2 :</i>		
Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. 	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah

3. Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah terdapat 11 program dan 69 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
 - 3). Program peningkatan disiplin aparatur
 1. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor
 - 4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 1. Pendidikan dan pelatihan formal (DID)
 - 5). Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja
 1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - 6). Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah
 1. Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
 2. Penyusunan Laporan Dana Transfer
 3. Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus
 - 7). Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
 1. Pendataan Wajib Pajak PBB
 2. Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggalan Pajak Daerah
 3. Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah
 4. Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah

5. Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah
6. Pelaksanaan Sidang Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Negara
- 8). Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 1. Penyusunan analisa standar belanja
 2. Penyusunan standar satuan harga
 3. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
 4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK
 5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK
 6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
 7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD dan DPPA SKPD
 8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 10. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 11. Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD
 12. Pembinaan / Pergeseran Anggaran
 13. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
 14. Peningkatan manajemen keuangan daerah
 15. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 16. Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan
 17. Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan
Daerah
 18. Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB

19. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak
 20. Pengelolaan Pelaporan Keuangan
 21. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak
 22. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 23. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 24. Penyusunan Perubahan KUA
 25. Penyusunan Perubahan PPAS
 26. Penyusunan Dokumen Satuan Harga
- 9). Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
 1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
 2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
- 10). Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
 1. Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah
 2. Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah
 3. Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD
 4. Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 5. Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 6. Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe
 7. Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 8. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 9. Buku Status Barang Milik Daerah
 10. Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah
 11. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- 11). Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
 1. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Pengelolaan Website dan Email BPKD
 3. Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan

Sesuai dengan uraian tersebut diatas maka sasaran - sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima Tahun adalah seperti berikut :

Tabel 2.3.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Lhokseumawe

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN KE					Target Akhir RPJM
		1	2	3	4	5	
Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
	Besaran Penerimaan PAD	45,54 Milyar	47,50 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar	49,20 Milyar
	Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok
	Opini BPK Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe merupakan proses penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada kebijakan dan program, kemudian ditetapkan dalam rencana strategik yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

- **Sasaran dan Indikator Sasaran**

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel : 2.4

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah
		Besaran penerimaan PAD
		Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK
		Opini BPK Laporan Keuangan Daerah
		Cakupan laporan pengelolaan aset daerah
2.	Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah

- **Program dan Kegiatan**

Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Program

- a. Pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah
- f. Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Daerah
- g. Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah
- h. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
- j. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
- k. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

2. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Untuk mewujudkan keberhasilan program yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe perlu didukung dengan adanya kegiatan yang nantinya dapat mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah. Adapun kegiatan dan indikator kegiatan yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.5

Kegiatan dan Indikator Kegiatan

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Periode Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pejabat Pengelolaan Keuangan BPKD

1	2	3
4	Penyediaan alat tulis kantor	Periode Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Periode Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Periode Penyediaan Peralatan Listrik , Alat dan Bahan Kebersihan
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Periode Penyediaan Bahan Bacaan
8	Penyediaan makanan dan minuman	Periode Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Periode Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
10	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap
11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Periode Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Periode Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor
16	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	Periode Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor
17	Pendidikan dan pelatihan formal (DID)	Periode Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Formal
18	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku RENJA SKPD
19	Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah Buku Laporan Register SP2D
20	Penyusunan Laporan Dana Transfer	Jumlah Laporan DAK Fisik dan DAK Non Fisik
21	Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Dana Otsus
22	Pendataan Wajib Pajak PBB	Periode Pendataan Wajib Pajak PBB
23	Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah	tersedianya surat ketetapan pajak daerah
24	Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah	Periode Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah

1	2	3
25	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	Periode Penataan Wajib Retribusi
26	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	Periode Pelaporan Piutang Retribusi Daerah
27	Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara	Jumlah Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
28	Penyusunan analisa standar belanja	Jumlah Buku Analisa Standar (ASB)
29	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga (SSH)
30	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
31	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun APBK
32	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBK dan DPPA SKPD
33	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah Dokumen Rancangan, Rencana dan Qanun P-APBK
34	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBK
35	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun tentang pertanggung jawaban APBK
36	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan qanun dan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban APBK
37	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Sosialisasi baru tentang pengelolaan keuangan daerah
38	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Buku Penyusunan dan Pedoman RKA-DPA SKPD
39	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan/pergeseran anggaran
40	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Rancangan Qanun Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
41	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Jumlah Dokumen Laporan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Buku Register
42	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah rancangan laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe

1	2	3
43	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah Peserta Bimtek SKPD Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan
44	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
45	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	Periode Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB
46	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	Jumlah Blangko SPPT PBB, SSPD PBB dan DHKP
47	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	Periode Pengelolaan Pelaporan Keuangan
48	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	Periode Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak
49	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah buku rancangan KUA dan Nota Kesepakatan KUA
50	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah buku rancangan PPAS dan Nota Kesepakatan PPAS
51	Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah buku KUA perubahan dan Nota kesepakatan KUA
52	Penyusunan Perubahan PPAS	Jumlah Buku PPAS Perubahan dan Nota Kesepakatan PPAS
53	Penyusunan Dokumen Satuan Harga	Jumlah Dokumen Penyusunan Satuan Harga
54	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Jumlah Buku Laporan Realisasi Anggaran
55	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD
56	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	Jumlah Buku Inventaris Aset Daerah
57	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	Periode Inventarisasi, Sertifikat Barang / Aset Daerah
58	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	Periode Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD
59	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
60	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	Periode Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
61	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Laporan BMD
62	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	Jumlah SKPD Yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Lancar

1	2	3
63	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku RKBMD
64	Buku Status Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Status Barang Milik Daerah
65	Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah ruas jalan dan Tanah dibawah jalan
66	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Jumlah Buku Harga Satuan Pokok Kegiatan
67	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Periode Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
68	Pengelolaan Website dan Email BPKD	Periode Pengeloaan Website Dan Email BPKD
69	Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan	Jumlah Aplikasi yang dikelola

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe telah membuat perjanjian kinerja tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 disusun mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 yang telah

ditetapkan. Adapun penyajian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.6

Matrik Pejanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12	Bulan
	Besaran Penerimaan PAD	47,79	Milyar
	Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7	Dokumen
	Opini BPK Laporan Keuangan	WTP	Opini
	Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8	Dokumen
Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12	Bulan

Untuk data perjanjian kinerja terinci dapat dilihat pada Lampiran (Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKj-IP disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menilai Akuntabilitas Kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja. Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Analisa dan evaluasi yang dilakukan disajikan menurut sasaran yang ada dalam Renstra OPD.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 merupakan hasil kegiatan yang dicapai dengan membandingkan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil apabila realisasi yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor : 7 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
SKALA PENGUKURAN KINERJA

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1	85 sampai dengan 100	Sangat berhasil
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Dalam melakukan pengukuran kinerja dari ke dua sasaran yang ditentukan, dapat dilihat pada masing-masing indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) **Sasaran 1**, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, pada tahun 2020 dilaksanakan 5 program yaitu :
 1. Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Daerah

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah :

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk melakukan penyusunan laporan pengeluaran/belanja Pemko Lhokseumawe, penyusunan laporan dana transfer dan penyusunan laporan dana otonomi khusus dengan target yang ditetapkan selama 12 bulan, target ini sama dengan realisasi yaitu 12 bulan sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

2. Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah.

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Besaran penerimaan PAD :

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk menilai jumlah besaran PAD yang diterima pada tahun anggaran 2019 dengan target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran pendapatan sebesar Rp. 47.787.500.000,- Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 45.835.848.850,15,- sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai 95,92 %.

Penurunan PAD ini disebabkan kurangnya tenaga petugas dan SDM dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta belum tergarapnya potensi pajak

daerah dan retribusi daerah di 4 kecamatan dengan maksimal

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan penyediaan pedoman dan dokumen APBK:

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk menilai penyediaan dokumen tentang pelaksanaan APBK, berupa dokumen standar satuan harga, dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK, dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBK, dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBK, dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBK dan DPPA SKPD dan Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan target yang ditetapkan sebanyak 7 Dokumen, Target ini sama dengan realisasi yaitu sebanyak 7 Dokumen, sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai 100,00%.

4. Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah.

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Opini BPK Laporan Keuangan :

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk menilai Opini BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe, melakukan validasi data

yang akurat dengan SKPD sehingga diperoleh data yang valid, transparan dan akuntabel dengan target yang ditetapkan WTP, target ini sama dengan realisasi yaitu WTP sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan laporan pengelolaan aset daerah :

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk menilai dokumen pengelolaan kekayaan daerah berupa dokumen inventarisasi aset daerah, Sertifikasi Barang/Aset Daerah, dokumen pemeliharaan aset bergerak dan tidak bergerak, dokumen penghapusan aset bergerak dan tidak bergerak, dokumen rekonsiliasi laporan barang milik daerah dengan SKPD, dokumen aset lancar dengan SKPD, Dokumen pendataan dan Pengamanan aset daerah dan dokumen harga satuan pokok kegiatan (HSPK) dengan target yang ditetapkan sebanyak 8 dokumen, target ini sama dengan realisasi sebanyak 8 dokumen sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

2) **Sasaran 2**, Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK Untuk mencapai sasaran Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK, pada tahun 2020 dilaksanakan 1 program yaitu :

1. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai indikator sasaran sebagai berikut :

- Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah :

Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk menilai pelaksanaan pelayanan pengelolaan jaringan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, manajemen pengelolaan aplikasi keuangan dan pengelolaan website dan e-mail BPKD dengan target yang ditetapkan selama 12 bulan, target ini sama dengan realisasi yaitu 12 bulan sehingga persentase pelaksanaan dapat dicapai sebesar 100,00%.

TABEL : 3.2

DATA PENILAIAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2020

No	SASARAN		CAPAIAN TAHUN 2019			KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TAR-GET	REALI SASI	%	
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%	Sangat Berhasil
		Besaran penerimaan PAD	47,79 Milyar	45,84 Milyar	95,92%	Sangat Berhasil
		Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK	7 Dok	7 Dok	100,00%	Sangat Berhasil
		Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00%	Sangat Berhasil
		Cakupan laporan pengelolaan aset daerah	8 Dok	8 Dok	100,00%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%	Sangat Berhasil
Tingkat Capaian Indikator Kinerja					99,32%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran satu dan dua mencerminkan keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe yang mencapai target 99,32% dalam kategori **Sangat Berhasil**

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RPJMD DAN PROGRAM PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006

Realisasi kinerja pada tahun 2020 selaras dengan Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor : 7 Tahun 2018, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

Realisasi Kinerja pada tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dengan 2 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja yang direalisasikan dengan 11 program dan 69 kegiatan telah selaras dengan RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2017-2022 dan program Permendagri 13/2006.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan

pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

➤ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah ditetapkan.**

Dari 6 indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe kesemuanya telah memenuhi target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun dalam Renstra SKPD, akan tetapi terdapat 1 indikator sasaran yang realisasinya dibawah target yang ditetapkan yaitu pada indikator sasaran :

- Besaran Penerimaan PAD, Target yang ditetapkan pada tahun 2020 untuk menilai prosentase penerimaan PAD Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebesar Rp. 47.787.500.000,- Target ini lebih rendah dari realisasi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 45.835.063.904,15, sehingga persentase yang diperoleh sebesar 95,91 %. Penurunan PAD ini disebabkan kurangnya tenaga petugas dan SDM dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah serta belum tergarapnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di 4 kecamatan dengan maksimal

Akan tetapi meski capaian kinerja tahun 2020 tidak sesuai dengan target / penurunan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra SKPD, namun masih ada permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah :

- a) Sumber – sumber pendapatan asli daerah belum tergali secara optimal;
- b) Pemahaman pengelolaan keuangan di masing – masing OPD mengenai akuntansi pemerintahan belum memadai;
- c) Administrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib.

Adapun solusi yang dilakukan adalah :

- a) Menciptakan dan mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan asli daerah;
- b) Meningkatkan kualitas SDM di SKPD melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan secara intensif dan efektif;
- c) Melakukan koordinasi dengan SKPD agar segera melakukan edit data aset tetap dan memantau verifikasi data aset.

➤ **Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM).**

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia setelah anggaran perubahan adalah sebesar Rp. 9.862.008.100,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya sebesar Rp. 8.758.703.893,07,- sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar Rp. 1.103.304.206,93,-. Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik dalam RPJMD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Sumber daya aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe berjumlah 73 orang, jumlah

personil tersebut dioptimalkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang disesuaikan dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.

➤ **Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang mengacu dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe mempunyai 11 (Sebelas) program dan 69 (Enam puluh sembilan) kegiatan untuk menunjang pencapaian target sasaran.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor

3). Program peningkatan disiplin aparatur

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor

4). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal (DID)

5). Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah

6). Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe
2. Penyusunan Laporan Dana Transfer
3. Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus

7). Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Wajib Pajak PBB

2. Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
 3. Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah
 4. Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah
 5. Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah
 6. Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara
- 8). Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan analisa standar belanja
2. Penyusunan standar satuan harga
3. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK
5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK
6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
10. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
11. Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD

12. Pembinaan / Pergeseran Anggaran
 13. Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 14. Peningkatan manajemen keuangan daerah
 15. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 16. Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan
 17. Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah
 18. Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB
 19. Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak
 20. Pengelolaan Pelaporan Keuangan
 21. Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak
 22. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 23. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
 24. Penyusunan Perubahan KUA
 25. Penyusunan Perubahan PPAS
 26. Penyusunan Dokumen Satuan Harga
- 9). Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah
- Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
 2. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
- 10). Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah
- Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah
 2. Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah
 3. Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD
 4. Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 5. Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak
 6. Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe
 7. Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 8. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 9. Buku Status Barang Milik Daerah
 10. Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah
 11. Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- 11). Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/kota

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Pengelolaan Website dan Email BPKD
3. Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan

Dari 69 (Enam puluh sembilan) kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe terdapat 12 kegiatan yang realisasi nya kurang dari 90 % dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik secara keseluruhan proses kegiatannya realisasi kinerjanya telah

maksimal dilakukan walaupun realisasi secara keuangan kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan terdapat belanja telepon dan belanja kawat / faximili / internet dan pembayaran rekening listrik yang pembayarannya disesuaikan dengan tagihan faktur setiap bulannya dari PT.Telkom dan dari PLN.

2. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Secara keseluruhan proses kegiatan penyediaan makanan dan minuman telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

3. Penyusunan Dana Otonomi Khusus

Secara keseluruhan proses kegiatan Penyusunan Dana Otonomi Khusus telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBK.

Realisasi kegiatan tersebut tidak tercapai dikarenakan penyampaian buku penjabaran APBK Tahun Anggaran 2021 baru selesai pada tanggal 30 Desember 2020 sehingga mengakibatkan realisasi dan serapan anggaran tidak maksimal.

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Secara keseluruhan proses kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD.

Secara keseluruhan proses kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA

SKPD telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

7. Pembinaan / Pergeseran Anggaran.

Secara keseluruhan proses kegiatan Pembinaan / Pergeseran Anggaran telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

8. Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan.

Secara keseluruhan kegiatan Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan telah dilaksanakan, namun karena adanya keharusan pemakaian Aplikasi SIPD sisa dana tersebut tidak dapat dicairkan berhubung aplikasi keuangan yang dikelola sudah berbeda.

9. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Secara keseluruhan proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

10. Penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Secara keseluruhan proses Penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

11. Penyusunan Perubahan KUA.

Secara keseluruhan proses Penyusunan Perubahan KUA telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

12. Penyusunan Perubahan PPAS.

Secara keseluruhan proses Penyusunan Perubahan PPAS telah maksimal dilakukan dan dana pada kegiatan dimaksud telah efisien digunakan

Adapun realisasi anggaran untuk kegiatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2020

Akuntabilitas keuangan menunjukkan seberapa besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Lhokseumawe serta mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe. Berikut adalah realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 :

1. PENDAPATAN

Target Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sesuai perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 47.787.500,00,- target ini terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	
	• Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 35.237.500.000,00
	• Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.900.000.000,00
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 5.200.000.000,00
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 5.450.000.000,00
	Jumlah Target PAD BPKD	Rp. 47.787.500.000,00

Dari target tersebut pada tahun 2020 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 45.835.848.850,15,- Atau tercapai sebesar 95,92 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Target (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	
	• Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 35.168.842.182,00
	• Hasil Retribusi Daerah	Rp. 1.018.121.571,00
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 4.107.896.492,00
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 5.540.988.605,15
	Jumlah Realisasi PAD BPKD	Rp. 45.835.848.850,15

2. BELANJA

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2020 setelah anggaran perubahan terdiri dari :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	11.944.471.000,00
2.	Belanja Langsung	9.862.008.100,00
	Total	21.806.479.100,00

Dari plafond belanja tersebut pada tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp. 20.284.038.735,07 Atau tercapai sebesar 93,02 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Anggaran (Rp.)
1.	Belanja Tidak Langsung	11.525.334.842,00
2.	Belanja Langsung	8.758.703.893,07
	Total	20.284.038.735,07

Rincian belanja langsung tahun 2020 sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

DATA PENCAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2019

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)	(%)
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.085.256.000	1.806.890.193,00	86,65
1	Penyediaan jasa surat menyurat	10.000.000	9.000.600	90,01
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	435.500.000	357.961.724	82,20
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	392.645.000	375.935.000	95,74
4	Penyediaan alat tulis kantor	75.000.000	74.786.000	99,71
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.000.000	21.544.800	97,93
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000	24.849.400	99,40
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.280.000	2.200.000	96,49
8	Penyediaan makanan dan minuman	70.100.000	34.010.000	48,52
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195.000.000	194.236.566	99,61
10	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	857.731.000	712.366.103	83,05
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	630.556.000	605.583.400,00	96,04
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.256.000	279.846.800	98,10
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	101.500.000	96.448.500	95,02
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000	136.945.500	91,30
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.800.000	82.623.600	98,60
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	10.000.000	9.719.000	97,19
	Program peningkatan disiplin aparatur	126.500.000	126.500.000,00	100,00
1	Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor	126.500.000	126.500.000	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.000.000	0	0
1	Pendidikan dan pelatihan formal (DID)	198.000.000	0	0

1	2	3	4	5
	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1.200.000	1.200.000,00	100,00
1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.200.000	100,00
	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	385.448.300	366.473.878,00	95,08
1	Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe	146.700.000	146.659.000	99,97
2	Penyusunan Laporan Dana Transfer	163.367.800	152.540.378	93,37
3	Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus	75.380.500	67.274.500	89,25
	Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	662.149.850	640.215.400,00	96,69
1	Pendataan Wajib Pajak PBB	178.646.950	178.028.800	99,65
2	Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggalan Pajak Daerah	48.783.000	48.726.000	99,88
3	Penagihan Rutin Tunggalan Retribusi Daerah	181.140.000	171.931.800	94,92
4	Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah	144.310.100	137.227.200	95,09
5	Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah	109.269.800	104.301.600	95,45
6	Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara	-	-	-
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.953.483.250	3.450.531.980,00	87,28
1	Penyusunan analisa standar belanja	-	-	-
2	Penyusunan standar satuan harga	27.500.000	25.503.500	92,74
3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	40.500.000	38.115.000	94,11
4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK	1.571.114.000	1.429.071.250	90,96
5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK	208.500.000	144.021.000	69,07
6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	142.198.500	86.454.000	60,80
7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD	155.677.500	117.575.000	75,52
8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	138.982.000	138.795.500	99,87

1	2	3	4	5
9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	75.634.000	72.477.500	95,83
10	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	-	-	-
11	Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD	29.448.700	-	-
12	Pembinaan / Pergeseran Anggaran	43.580.000	38.765.000	88,95
13	Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	25.500.000	-	-
14	Peningkatan manajemen keuangan daerah	105.458.800	95.983.750	91,02
15	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe	140.634.000	140.576.500	99,96
16	Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan	44.698.600	31.038.000	69,44
17	Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-
18	Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB	160.046.500	159.690.500	99,78
19	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak	411.240.000	409.807.000	99,65
20	Pengelolaan Pelaporan Keuangan	55.700.000	54.950.000	98,65
21	Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak	233.860.350	233.597.880	99,89
22	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	33.025.000	14.200.000	43,00
23	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	52.103.200	25.368.200	48,69
24	Penyusunan Perubahan KUA	24.390.400	5.958.400	24,43
25	Penyusunan Perubahan PPAS	51.562.700	10.083.500	19,56
26	Penyusunan Dokumen Satuan Harga	182.129.000	178.500.500	98,01
	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	177.564.000	175.169.000,00	98,65
1	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	88.982.000	87.128.000	97,92
2	Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	88.582.000	88.041.000	99,39
	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.041.717.600	1.004.154.942,07	96,39
1	Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah	28.500.000	28.150.500	98,77
2	Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah	64.660.000	52.788.880	81,64
3	Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD	55.700.000	52.967.500	95,09
4	Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	394.735.000	385.749.462	97,72
5	Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak	37.184.000	36.107.000	97,10

1	2	3	4	5
6	Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe	40.434.000	39.547.000	97,81
7	Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	40.370.000	40.283.500	99,79
8	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.500.000	40.025.000	98,83
9	Buku Status Barang Milik Daerah	72.190.000	71.699.900	99,32
10	Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah	185.399.600	180.491.200	97,35
11	Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	82.045.000	76.345.000	93,05
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	600.133.100	581.985.100,00	96,98
1	Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	117.887.800	111.784.800	94,82
2	Pengelolaan Website dan Email BPKD	50.500.000	49.210.000	97,45
3	Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan	431.745.300	420.990.300	97,51
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	9.862.008.100	8.758.703.893,07	88,81

Untuk mewujudkan 69 (Enam puluh sembilan) kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2020, tersedia dana sebesar Rp. 9.862.008.100,00,- yang dibiayai dari APBK Tahun Anggaran 2020, dari dana tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 8.758.703.893,07,- atau tercapai sebesar 88,81 % sehingga terdapat sisa belanja sebesar Rp. 1.103.304.206,93 ,- atau sekitar 11,19 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang disusun Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2020 dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penyusunan LKj-IP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja. Rencana kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab II tersebut diatas adalah merupakan penjabaran dari pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017 – 2022. Dari sejumlah program dan kegiatan dimaksud secara umum telah dapat terealisasi dengan baik serta memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2017 – 2022 sebagaimana daftar analisis terlampir.

Akuntabilitas kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, dimana tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik sehingga apa yang menjadi sasaran pencapaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini diharapkan sebagai alat pemacu bagi seluruh staf yang terlibat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas seorang Pegawai Negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Para penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) berikutnya diharapkan lebih meningkatkan perhatiannya terhadap Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/Barang Daerah sehingga dapat tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

Lhokseumawe, Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA
LHOKSEUMAWE



II. MARWADI YUSUF, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641118 199301 1 002



**LKj-IP BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2017-2022.
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020.
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
5. Lampiran Lainnya.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2017- 2022**

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe

Visi : "Mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera berdasarkan UUPA dan MoU Helsinki"

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik (Clean And Good Governance)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN / RUMUS	TARGET THN AKHIR RENSTRA/ RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Kategori Reformasi Birokrasi	1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1.1.1. Opini BPK	1.1.1.1. Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bulan
				1.1.1.2. Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	Jumlah Dokumen Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dokumen
				1.1.1.3. Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
				1.1.1.4. Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dokumen
			1.1.2. Besaran Penerimaan PAD	1.1.2.1. Besaran Penerimaan PAD	Jumlah Besaran Penerimaan PAD	49,20 Milyar
		2.1. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	2.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.1.1.1. Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bulan

PENGUKURAN KINERJA

SKPD

: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWA

TAHUN ANGGARAN

: 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%
		Besaran Penerimaan PAD	47,79 Milyar	45,84 Milyar	95,92%
		Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dok	7 Dok	100,00%
		Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00%
		Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dok	8 Dok	100,00%
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%
					99,32%

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWA,



Ir. MARWADI YUSUF, M.Si

NIP. 19641118 199301 1 002

PENGUKURAN KINERJA

SKPD

: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKSEUMAWA

TAHUN ANGGARAN

: 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%
		Besaran Penerimaan PAD	47,79 Milyar	45,84 Milyar	95,92%
		Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK	7 Dok	7 Dok	100,00%
		Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100,00%
		Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah	8 Dok	8 Dok	100,00%
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bln	12 Bln	100,00%
					99,32%

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWA,



Ir. MARWADI YUSUF, M.Si

NIP. 19641118 199301 1 002



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKEUMAWA
NOMOR : 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH
KOTA LHOKEUMAWA**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA LHOKEUMAWA,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan ILPPD;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 – 2022.

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 02 Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,**



AZWAR, SH, MAP

NIP. 19630925 200212 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KOTA LHOKEUMAWA
 NOMOR : 19 TAHUN 2020
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA LHOKEUMAWA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN/RUMUS	SATUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Opini BPK	Cakupan Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah Cakupan Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK Opini BPK Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Penyediaan Pedoman dan Dokumen APBK Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Bulan Dokumen Opini
2.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan TIK	Besaran Penerimaan PAD Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Laporan Pengelolaan Aset Daerah Besaran Penerimaan PAD Cakupan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Aset Daerah Jumlah Besar Penerimaan PAD Jumlah Waktu Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Dokumen Milyar Bulan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KOTA LHOKEUMAWA,



AZWAR/SH, MAP
 Nip. 19630925 200212 1 003



PEMERINTAH KOTA LHOXSEUMAWE
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	47.787.500.000,00	45.835.848.850,15	(1.951.651.149,85)	95,92	Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2012 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2012 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2012 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2012 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2012 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2012 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2013 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2013 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 04 Tahun 2010 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2016 Qanun Kota Lhokseumawe No. 02 Tahun 2020
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	47.787.500.000,00	45.835.848.850,15	(1.951.651.149,85)	95,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	35.237.500.000,00	35.168.842.182,00	(68.657.818,00)	99,81	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.900.000.000,00	1.018.121.571,00	(881.878.429,00)	53,59	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	4.107.896.492,00	(1.092.103.508,00)	79,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.450.000.000,00	5.540.988.605,15	90.988.605,15	101,67	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	21.806.479.100,00	20.284.038.735,07	(1.522.440.364,93)	93,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.944.471.000,00	11.525.334.842,00	(419.136.158,00)	96,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.944.471.000,00	11.525.334.842,00	(419.136.158,00)	96,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	9.862.008.100,00	8.758.703.893,07	(1.103.304.206,93)	88,81	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.085.256.000,00	1.806.890.193,00	(278.365.807,00)	86,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	10.000.000,00	9.000.600,00	(999.400,00)	90,01	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.000.600,00	(999.400,00)	90,01	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	435.500.000,00	357.961.724,00	(77.538.276,00)	82,20	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	435.500.000,00	357.961.724,00	(77.538.276,00)	82,20	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	392.645.000,00	375.935.000,00	(16.710.000,00)	95,74	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	390.000.000,00	373.290.000,00	(16.710.000,00)	95,72	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	75.000.000,00	74.786.000,00	(214.000,00)	99,71	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.786.000,00	(214.000,00)	99,71	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	22.000.000,00	21.544.800,00	(455.200,00)	97,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	21.544.800,00	(455.200,00)	97,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 13	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	25.000.000,00	24.849.400,00	(150.600,00)	99,40	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.849.400,00	(150.600,00)	99,40	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	2.280.000,00	2.200.000,00	(80.000,00)	96,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.200.000,00	(80.000,00)	96,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	70.100.000,00	34.010.000,00	(36.090.000,00)	48,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.100.000,00	34.010.000,00	(36.090.000,00)	48,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	195.000.000,00	194.236.566,00	(763.434,00)	99,61	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	194.236.566,00	(763.434,00)	99,61	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20	<i>Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap</i>	857.731.000,00	712.366.103,00	(145.364.897,00)	83,05	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	694.080.000,00	599.280.000,00	(94.800.000,00)	86,34	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.651.000,00	113.086.103,00	(50.564.897,00)	69,10	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	630.556.000,00	605.583.400,00	(24.972.600,00)	96,04	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 11	<i>Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	285.256.000,00	279.846.800,00	(5.409.200,00)	98,10	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	285.256.000,00	279.846.800,00	(5.409.200,00)	98,10	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	101.500.000,00	96.448.500,00	(5.051.500,00)	95,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	101.500.000,00	96.448.500,00	(5.051.500,00)	95,02	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	150.000.000,00	136.945.500,00	(13.054.500,00)	91,30	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	136.945.500,00	(13.054.500,00)	91,30	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 30	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	83.800.000,00	82.623.600,00	(1.176.400,00)	98,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.800.000,00	82.623.600,00	(1.176.400,00)	98,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 34	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor</i>	10.000.000,00	9.719.000,00	(281.000,00)	97,19	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.719.000,00	(281.000,00)	97,19	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 . 06	<i>Penyediaan Sewa Gedung/Gudang Kantor</i>	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01	<i>Pendidikan dan pelatihan formal (DID)</i>	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	0,00	(198.000.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Program Penyusunan Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kerja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 02	<i>Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Efektifitas Pengeluaran Daerah	385.448.300,00	366.473.878,00	(18.974.422,00)	95,08	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 17	<i>Penyusunan Laporan Pengeluaran/Belanja Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	146.700.000,00	146.659.000,00	(41.000,00)	99,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.000.000,00	145.959.000,00	(41.000,00)	99,97	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18	<i>Penyusunan Laporan Dana Transfer</i>	163.367.800,00	152.540.378,00	(10.827.422,00)	93,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.667.800,00	151.840.378,00	(10.827.422,00)	93,34	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 19	<i>Penyusunan Laporan Dana Otonomi Khusus</i>	75.380.500,00	67.274.500,00	(8.106.000,00)	89,25	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.880.500,00	66.774.500,00	(8.106.000,00)	89,17	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	Prgram Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah	662.149.850,00	640.215.400,00	(21.934.450,00)	96,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 20	<i>Pendataan Wajib Pajak PBB</i>	178.646.950,00	178.028.800,00	(618.150,00)	99,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.700.000,00	127.700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.946.950,00	50.328.800,00	(618.150,00)	98,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 21	<i>Penagihan Rutin dan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah</i>	48.783.000,00	48.726.000,00	(57.000,00)	99,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.683.000,00	13.626.000,00	(57.000,00)	99,58	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 52	<i>Penagihan Rutin Tunggakan Retribusi Daerah</i>	181.140.000,00	171.931.800,00	(9.208.200,00)	94,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.100.000,00	69.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.040.000,00	102.831.800,00	(9.208.200,00)	91,78	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 53	<i>Pendataan, Penetapan Retribusi Daerah dan Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	144.310.100,00	137.227.200,00	(7.082.900,00)	95,09	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.100.000,00	68.400.000,00	(700.000,00)	98,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.210.100,00	68.827.200,00	(6.382.900,00)	91,51	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 54	<i>Pelaporan dan Verifikasi Piutang Retribusi Daerah</i>	109.269.800,00	104.301.600,00	(4.968.200,00)	95,45	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.100.000,00	69.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.169.800,00	35.201.600,00	(4.968.200,00)	87,63	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 57	<i>Pelaksanaan Sidang Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.953.483.250,00	3.450.531.980,00	(502.951.270,00)	87,28	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01	<i>Penyusunan analisa standar belanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02	<i>Penyusunan standar satuan harga</i>	27.500.000,00	25.503.500,00	(1.996.500,00)	92,74	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.850.000,00	13.850.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	11.653.500,00	(1.996.500,00)	85,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03	<i>Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah</i>	40.500.000,00	38.115.000,00	(2.385.000,00)	94,11	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	7.215.000,00	(2.385.000,00)	75,16	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBK</i>	1.571.114.000,00	1.429.071.250,00	(142.042.750,00)	90,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.311.400.000,00	1.220.400.000,00	(91.000.000,00)	93,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	259.714.000,00	208.671.250,00	(51.042.750,00)	80,35	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBK</i>	208.500.000,00	144.021.000,00	(64.479.000,00)	69,07	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	207.600.000,00	143.121.000,00	(64.479.000,00)	68,94	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD</i>	142.198.500,00	86.454.000,00	(55.744.500,00)	60,80	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.498.500,00	85.754.000,00	(55.744.500,00)	60,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 09	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dan DPPA SKPD</i>	155.677.500,00	117.575.000,00	(38.102.500,00)	75,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.977.500,00	116.875.000,00	(38.102.500,00)	75,41	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10	<i>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i>	138.982.000,00	138.795.500,00	(186.500,00)	99,87	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.582.000,00	62.395.500,00	(186.500,00)	99,70	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11	<i>Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD</i>	75.634.000,00	72.477.500,00	(3.156.500,00)	95,83	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.934.000,00	71.777.500,00	(3.156.500,00)	95,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 14	<i>Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21	<i>Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan RKA dan DPA SKPD</i>	29.448.700,00	0,00	(29.448.700,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.948.700,00	0,00	(28.948.700,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 22	<i>Pembinaan / Pergeseran Anggaran</i>	43.580.000,00	38.765.000,00	(4.815.000,00)	88,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.880.000,00	38.065.000,00	(4.815.000,00)	88,77	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 23	<i>Penyusunan Rancangan Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26	<i>Peningkatan manajemen keuangan daerah</i>	105.458.800,00	95.983.750,00	(9.475.050,00)	91,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.558.800,00	38.083.750,00	(9.475.050,00)	80,08	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 27	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	140.634.000,00	140.576.500,00	(57.500,00)	99,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.400.000,00	76.400.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.234.000,00	64.176.500,00	(57.500,00)	99,91	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 29	<i>Bimtek Pengelolaan Aplikasi SIMDA Keuangan</i>	44.698.600,00	31.038.000,00	(13.660.600,00)	69,44	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.998.600,00	31.038.000,00	(12.960.600,00)	70,54	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 35	<i>Penyusunan Sistem dan Prosedur (SISDUR) Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 39	<i>Pelayanan Validasi dan Verifikasi SSPD BPHTB</i>	160.046.500,00	159.690.500,00	(356.000,00)	99,78	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	93.100.000,00	93.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.946.500,00	66.590.500,00	(356.000,00)	99,47	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40	<i>Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak</i>	411.240.000,00	409.807.000,00	(1.433.000,00)	99,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.900.000,00	123.900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.024.000,00	115.591.000,00	(433.000,00)	99,63	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	171.316.000,00	170.316.000,00	(1.000.000,00)	99,42	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 46	<i>Pengelolaan Pelaporan Keuangan</i>	55.700.000,00	54.950.000,00	(750.000,00)	98,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	19.850.000,00	(750.000,00)	96,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 51	<i>Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Wajib Pajak</i>	233.860.350,00	233.597.880,00	(262.470,00)	99,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.760.350,00	119.497.880,00	(262.470,00)	99,78	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 52	<i>Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)</i>	33.025.000,00	14.200.000,00	(18.825.000,00)	43,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.525.000,00	13.700.000,00	(18.825.000,00)	42,12	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 53	<i>Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)</i>	52.103.200,00	25.368.200,00	(26.735.000,00)	48,69	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.403.200,00	24.668.200,00	(26.735.000,00)	47,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 54	<i>Penyusunan Perubahan KUA</i>	24.390.400,00	5.958.400,00	(18.432.000,00)	24,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.890.400,00	5.458.400,00	(18.432.000,00)	22,85	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 55	<i>Penyusunan Perubahan PPAS</i>	51.562.700,00	10.083.500,00	(41.479.200,00)	19,56	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.862.700,00	9.383.500,00	(41.479.200,00)	18,45	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 56	<i>Penyusunan Dokumen Satuan Harga</i>	182.129.000,00	178.500.500,00	(3.628.500,00)	98,01	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.700.000,00	120.000.000,00	(700.000,00)	99,42	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.429.000,00	58.500.500,00	(2.928.500,00)	95,23	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Daerah	177.564.000,00	175.169.000,00	(2.395.000,00)	98,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 02	<i>Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran</i>	88.982.000,00	87.128.000,00	(1.854.000,00)	97,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.682.000,00	12.828.000,00	(1.854.000,00)	87,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05	<i>Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD</i>	88.582.000,00	88.041.000,00	(541.000,00)	99,39	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	76.900.000,00	76.900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.682.000,00	11.141.000,00	(541.000,00)	95,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	1.041.717.600,00	1.004.154.942,07	(37.562.657,93)	96,39	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 04	<i>Penyusunan Buku Inventaris Aset Daerah</i>	28.500.000,00	28.150.500,00	(349.500,00)	98,77	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	12.850.500,00	(349.500,00)	97,35	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 08	<i>Inventarisasi dan Sertifikasi Barang/Aset Daerah</i>	64.660.000,00	52.788.880,00	(11.871.120,00)	81,64	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.060.000,00	24.188.880,00	(11.871.120,00)	67,08	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 09	<i>Verifikasi Penyusunan Laporan Realisasi PPKD</i>	55.700.000,00	52.967.500,00	(2.732.500,00)	95,09	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	52.267.500,00	(2.732.500,00)	95,03	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11	<i>Pemeliharaan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak</i>	394.735.000,00	385.749.462,07	(8.985.537,93)	97,72	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	367.235.000,00	358.249.462,07	(8.985.537,93)	97,55	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 12	<i>Penghapusan Aset Daerah Bergerak dan Tidak Bergerak</i>	37.184.000,00	36.107.000,00	(1.077.000,00)	97,10	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.284.000,00	12.207.000,00	(1.077.000,00)	91,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 26	<i>Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dengan SKPD di Jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	40.434.000,00	39.547.000,00	(887.000,00)	97,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.334.000,00	16.447.000,00	(887.000,00)	94,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 28	<i>Rekonsiliasi Aset Lancar dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe</i>	40.370.000,00	40.283.500,00	(86.500,00)	99,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.270.000,00	17.183.500,00	(86.500,00)	99,50	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 33	<i>Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>	40.500.000,00	40.025.000,00	(475.000,00)	98,83	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.325.000,00	(475.000,00)	97,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 40	<i>Buku Status Barang Milik Daerah</i>	72.190.000,00	71.699.900,00	(490.100,00)	99,32	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.700.000,00	34.700.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.490.000,00	36.999.900,00	(490.100,00)	98,69	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 52	<i>Pendataan dan Pengamanan Aset Daerah</i>	185.399.600,00	180.491.200,00	(4.908.400,00)	97,35	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.600.000,00	79.600.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.799.600,00	100.891.200,00	(4.908.400,00)	95,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 53	<i>Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)</i>	82.045.000,00	76.345.000,00	(5.700.000,00)	93,05	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 53 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	65.300.000,00	65.300.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.745.000,00	11.045.000,00	(5.700.000,00)	65,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	600.133.100,00	581.985.100,00	(18.148.000,00)	96,98	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08	<i>Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	117.887.800,00	111.784.800,00	(6.103.000,00)	94,82	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.650.000,00	70.950.000,00	(700.000,00)	99,02	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.937.800,00	23.314.800,00	(4.623.000,00)	83,45	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.300.000,00	17.520.000,00	(780.000,00)	95,74	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 10	<i>Pengelolaan Website dan Email BPKD</i>	50.500.000,00	49.210.000,00	(1.290.000,00)	97,45	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.500.000,00	44.000.000,00	(500.000,00)	98,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.210.000,00	(790.000,00)	86,83	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 11	<i>Manajemen Pengelolaan Aplikasi Keuangan</i>	431.745.300,00	420.990.300,00	(10.755.000,00)	97,51	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	376.300.000,00	375.600.000,00	(700.000,00)	99,81	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.445.300,00	29.390.300,00	(9.055.000,00)	76,45	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.000.000,00	16.000.000,00	(1.000.000,00)	94,12	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.981.020.900,00	25.551.810.115,08	(429.210.784,92)	98,35	